

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan Revisi. Surabaya: Surabaya: Bina Ilmu, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 270/B/2020/PT.TUN.JKT.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 292 K/TUN/2021.

Jurnal / Referensi Pendukung

Simanjuntak, Enrico. “Disparitas Putusan Hakim dalam Sengketa Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1, 2020.

Simanjuntak, Enrico. “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Simanjuntak, Enrico. “Upaya Administratif sebagai Prasyarat Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2019.

Hasibuan, H.A. Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla*, Vol. 15 No. 2, 2023.

Istirahat, I. “*Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*.” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi*, 2023.

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 2014.

Pradana, S.A. “Keadilan Hijau dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” 2025.

Ridwan, dkk. “Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018.

Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Jurnal Moderat*, Vol. 8 No. 2, 2022.